

THEORYTALKS

**PERBINCANGAN PAKAR SEDUNIA
TENTANG
TEORI HUBUNGAN INTERNASIONAL
ABAD KE-21**

Editor

Peer Schouten

Bambang Wahyu Nugroho

Ahmad Hanafi Rais

Kata Pengantar

Prof. Dr. Mohtar Mas'ood, M.A.

DAFTAR ISI

PENGANTAR: Mohtar Mas'ood	
PENDAHULUAN: Bambang Wahyu Nugroho & Ahmad Hanafi Rais	
01. Michael Doyle tentang Pasar dan Lembaga	
02. Martin Shaw tentang Dialektika Perang dan Negara Dunia (<i>World State</i>).....	
03. Alexander Wendt tentang UFO, Angsa Hitam, dan Teori Konstruktivis Hubungan Internasional	
04. John Agnew tentang Geopolitik dan Batas Kekuasaan dalam Hubungan Internasional	
05. Timothy J. Sinclair tentang Kekuatan Sosial, Korporasi Transnasional, dan Pemerintahan Global	
06. Klaus Dodds tentang James Bond, Argumen Final Pendekatan Geopolitik dalam Hubungan Internasional, dan Bendera Rusia di Dasar Lautan	
07. Joseph Nye tentang Mengajari Amerika agar Menjadi Lebih Seperti Inggris	
08. Arend Lijphart tentang Berbagi Kekuasaan di Afrika dan Masa Depan Demokrasi	
09. Robert Keohane tentang Lembaga-lembaga Internasional dan Kebutuhan akan Pembaharuan di Bidang Kajian Hubungan Internasional	
10. Timothy Shaw tentang Pentingnya BRICs dan Memahami Selatan Global	
11. Peter Haas tentang Konstruktivisme Sosial, Keterkelolaan Pasar, dan Pengaturan Lingkungan Hidup	
12. Robert Jervis tentang Senjata Nuklir, Menjelaskan Politik Non-Realis dari Pemerintahan Bush dan Kehadiran Militer AS di Eropa	
13. Immanuel Wallerstein tentang Sistem-Dunia, Kapitalisme yang Segera Kiamat dan Menyatukan Ilmu Sosial	
14. Geoffrey Underhill tentang Krisis Ekonomi AS, Kemustahilan untuk Memisahkan Negara dan Pasar, dan Nilai Kekinian dari Pemikiran Adam Smith	
15. Peter Katzenstein tentang Anti-Amerikanisme, Eklektisisme Analitik dan Kekuatan Regional	
16. Robert Hayden tentang Antropologi Konstitusional, Penggerogotan NATO terhadap Konsensus PBB dan Nasionalisme di Balkan	
17. Benjamin Jerry Cohen tentang Peperangan Mata Uang dan Menghidupkan Kembali Aspek “Politikal” dalam Ekonomi Politik Internasional	
18. James Fearon tentang Masyarakat Rentan Konflik, bagaimana Mendefinisikan Etnisitas dan Mereformasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa	
19. Fredrik Söderbaum tentang Negara yang Semakin Melemah, Konseptualisasi Kawasan dan Eropa sebagai Aktor Global	
20. David Harvey tentang Geografi Kapitalisme, Memahami Kota-kota sebagai <i>Polities</i> dan Imperialisme yang Bergeser	
21. Stephen Krasner tentang Kedaulatan, Negara Gagal, dan Rezim Internasional	
22. Kevin Dunn tentang Identitas dalam Hubungan Internasional, Tantangan Afrika terhadap Teori HI, dan Bias Pria Kulit Putih dalam Bidang Kajian HI	
23. Kees Van Der Pijl dalam Kematian Partai-partai Sayap Kiri di Eropa, Imperium dan Nilai Terkini dari Marx	
24. Robert Bates tentang Politik Kopi, Kajian <i>Small-N</i> , dan Menghancurkan Definisi Negara ..	
25. Antonio Marquina tentang Kebohongan Globalisasi, Keamanan Energi dan Tantangan untuk Kebijakan Luar Negeri Negara-negara Eropa	
26. Jennifer Mitzen tentang Keamanan Ontologis, Diplomasi Multilateral, dan Ketergantungan Negara terhadap Perang	
27. Christian Reus-Smit tentang Budaya HI, Memikirkan Kembali HI dan Menjembatani Kesenjangan antara Normatif dan Empirik	
28. Marisya Zalewski tentang Pergolakan dalam HI, Maskulinitas dan Membuat Teori HI Menarik (Kembali)	
29. Peter W. Singer tentang Tentara Anak, Tentara Swasta dan Tentara Robot	
30. Mary Kaldor tentang Membingkai Perang, Kompleks Industri Militer, dan Keamanan Manusia	
'EPILOG': Bambang Wahyu Nugroho & Ahmad Hanafi Rais	

PENGANTAR: KEBERAGAMAN BERTEORI

Mohtar Mas'ood

Pendahuluan buku ini diawali dengan mengutip pernyataan yang dibuat oleh penulis pengantar ini hampir dua puluh tahun lalu, yaitu bahwa keberagaman mewarnai kegiatan teoritik dan penelitian dalam studi Hubungan Internasional (HI). Bagi sebagian penggiat studi ini, kondisi ini merepotkan. Terutama karena seolah-olah masing-masing kelompok ilmuwan mengajukan pertanyaan yang saling-berbeda, mencari jawab atas pertanyaan itu dengan metode yang juga berbeda, dan menghasilkan rumusan teoritik yang berbeda-beda. Bahkan seringkali fenomena yang sama dianalisis dengan memakai teori dan cara analisis berbeda dan menghasilkan jawaban yang berbeda.

Namun sebagian yang lain, memandang fakta keberagaman dalam studi HI itu seperti halnya “bunga rampai.” Bunga berwarna-warni itu justru menimbulkan daya tarik tersendiri. Masing-masing mungkin berusaha menegaskan coraknya sendiri-sendiri, tetapi yang sangat mungkin adalah bahwa masing-masing menyumbang pada keindahan holistiknya. Masing-masing teori yang saling-berbeda dan bahkan cenderung berbenturan itu memiliki kegunaan untuk konteks kemunculan masing-masing. Seperti halnya yang terjadi dengan bunga rampai itu, suatu kali akan datang seorang “seniman” yang merangkai beberapa teori itu menjadi satu paduan dan memunculkan teori baru.

Buku yang Anda baca ini merupakan contoh bahwa studi HI masih menunjukkan keberagaman. Para teoritis yang diwawancarai, sejumlah tiga-puluh orang, mengajukan persoalan yang berbeda untuk dipikirkan dan diselesaikan. Masing-masing mengutamakan isu tertentu dalam hubungan antar-kelompok manusia yang di berbagai bagian dunia. Masing-masing menganggap isu yang diajukannya yang paling bermakna untuk dijawab atau dicarikan pemecahannya. Masing-masing menegaskan cara berpikirnya atau perspektifnya sendiri, bahkan seringkali dengan menafikan yang lain.

Menanggapi kenyataan ini, posisi penulis pengantar ini bisa dirumuskan secara sederhana: keberagaman adalah berkah. Posisi ini memandang masing-masing perspektif mengungkapkan “kenyataan” yang berbeda. Disini ada pengakuan bahwa “realitas” tidak tunggal, bahkan ada “realitas majemuk.” Tergantung pada cara memandangnya. Juga ada “cara membaca yang majemuk” dalam studi HI. Masing-masing mengusulkan cara memahami dan masing-masing berusaha memberi pemahaman.

Yang penting ditegaskan di sini adalah bahwa itu semua dimaksudkan untuk membuat fenomena HI dalam dunia yang kompleks menjadi bisa dipahami oleh yang berminat memahaminya. Sebagai warga dunia yang semakin sulit untuk saling-mengelak tetapi juga semakin sulit untuk bersepakat, seharusnya kita semua berusaha memahami sehingga bisa mengenali dilemma yang dihadapi dan mencari jalan keluar dari persoalan dilematik itu.

Bagaimana pembaca memanfaatkan bacaan beragam seperti ini? Jawabnya tergantung pada siapa Anda. Kalau Anda adalah pemula dalam studi HI, mungkin perlu menunda. Selesaikan dulu bacaan pengantar HI. Sesudah mengerti konsep-konsep dasar itu, baru membaca kumpulan wawancara ini. Karena banyak sekali konsep-konsep yang disebut tetapi tidak dijelaskan maknanya karena memang tidak cukup ruang untuk itu.

Kalau Anda bertujuan mencari teori yang “siap pakai,” bersiaplah untuk kecewa. Karena memang tidak ada rumusan teoritik yang “siap pakai.” Yang tersaji disini adalah bagaimana para teoritisi itu bergiat sehingga sampai pada gagasan dan konseptualisasi itu dan dibumbui dengan ilustrasi menarik tentang bagaimana gagasan teoritik itu diterapkan pada fenomena HI.

Untuk yang sedang bersiap menulis usulan penelitian, misalnya untuk skripsi, usul saya sebagai berikut. Cari dari berbagai wawancara ini satu (atau beberapa) proposisi atau argumen yang menurut Anda menarik. Pikirkan dalam-dalam. Uraikan unsur-unsurnya dan bagaimana berbagai unsur itu dihubungkan. Lalu susun kembali sesuai dengan keperluan penelitian Anda.

Bagi yang sedang mempersiapkan “ujian komprehensif,” yang bertujuan menilai kemampuan Anda memahami secara komprehensif pengetahuan HI, buku menyajikan bahan dasar cukup kaya. Ini bisa dipakai untuk mulai membuat peta tentang fenomena apa saja yang dipelajari oleh ilmu HI; bagaimana cara mempelajarinya; dan pengetahuan apa yang telah diakumulasi oleh ilmu ini.

Dalam pandangan penulis pengantar ini, kumpulan wawancara ini merupakan bahan yang kaya untuk mempelajari sosiologi pengetahuan mengenai teorisasi dalam bidang HI. Buku ini menunjukkan bahwa berteori HI adalah pekerjaan yang manusiawi dan sosial; bukan mekanistik, kering dan *solitary*. Pertanyaan atau persoalan yang ditekuni oleh para teoritisi itu, yang mungkin berlangsung selama bertahun-tahun, seringkali berkaitan dengan pengalaman personal atau obsesi pribadi. Ini jelas nampak dalam karya para teoritisi klasik. Dua-puluh empat abad yang lalu, pengalaman dalam peperangan membuat Thucydides menulis tentang bagaimana fenomena itu terjadi dalam *The Peloponesian War*, sehingga muncul teori yang kemudian dikenal sebagai “balance of power.” Mereka yang terlibat atau menderita akibat Perang Dunia II atau Perang Dingin (kira-kira antara 1945-1989) mendorong banyak teoritisi yang menghasilkan banyak analisis yang umumnya bertujuan normatif sama, yaitu bagaimana menghindarkan terjadinya perang dan mendorong munculnya perdamaian. Obsesi David Mitrany untuk menghindarkan perang melalui jalur non-politik menghasilkan teori fungsionalisme yang menjadi landasan kerjasama regional Eropa Barat. Contoh seperti ini banyak sekali dalam karya-karya teoritik HI. Dengan kata lain, teorisasi adalah karya sosial, bukan semata-mata urusan nalar. Pergulatan mencari jawab atas persoalan itu berlangsung dengan melibatkan hubungan sosial.

Terakhir, penulis pengantar ini menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada siapa saja yang mempermudah upaya untuk mendorong studi HI, termasuk menyediakan bacaan seperti ini.

Selamat membaca.

Yogyakarta, Pebruari 2012

PENDAHULUAN:
TEORI HUBUNGAN INTERNASIONAL
MEMASUKI MILENIUM KETIGA
Bambang Wahyu Nugroho – Ahmad Hanafi Rais

Ketika menjelaskan perkembangan ilmu hubungan internasional (HI), Mohtar Mas'ood sampai pada kesimpulan bahwa *tema umum teorisasi dalam Ilmu Hubungan Internasional dewasa ini adalah keanekaragaman dan ketidaksepakatan*.¹ Ilmu HI berkembang – sesuai dengan pendapat Thomas Kuhn² – dalam tahap-tahap dan setiap tahap didominasi oleh semacam “paradigma” atau pandangan dunia sebagai hasil kesepakatan dari sebagian ilmuwannya untuk menerima atau menolak suatu pandangan teoritis. Upaya itu pun tidak mencapai konsensus paradigmatis dalam membangun teori ini di tahun 1990-an dan setelahnya, bahkan mempertanyakan apakah teori-teori ‘baru’ yang muncul belakangan ini bukan sekadar pernyataan ulang dari gagasan lama, bagaikan ‘anggur lama di dalam botol baru.’³

Hampir seabad sejak pertama kalinya hubungan internasional dijadikan sebagai cabang dari ilmu politik, kajian HI telah melampaui beberapa tahap yang sering disebut sebagai “perdebatan besar” (*great debates*): utopian, realis, dan behavioral – atau, dengan kata lain, normatif, normatif-empirik, dan behavioral-kuantitatif.⁴ Pada awalnya, HI sebagai suatu disiplin keilmuan didirikan di University of Wales, Aberystwyth, Inggris pada tahun-tahun dekat pasca Perang Dunia I dengan tujuan mempelajari bagaimana prinsip-prinsip *balance of power* yang gagal dan menyebabkan Perang Dunia I itu dapat digantikan dengan prinsip keamanan kolektif (*collective security*) yang kemudian melahirkan Liga Bangsa-Bangsa (LBB – *League of Nations*). Karena mencitakan hubungan internasional yang aman, damai, dan rukun, maka para penggagasnya kemudian disebut kaum idealis.⁵ Namun kenyataannya dunia kembali dicekam oleh krisis keamanan yang akut dengan bangkitnya para pemimpin fasis, seperti Hitler dan Mussolini yang menyebabkan terjadinya Perang Dunia II. Tak ayal lagi, pemikiran idealis itu pun mendapatkan kritik tajam, terutama dari Edward Halett Carr dalam bukunya *The Twenty Years' Crisis* (1939) dan Hans J. Morgenthau, *Politics Among Nations* (1948). Keduanya lebih melihat perilaku hubungan internasional dalam artian kekuatan (*power*), dengan fokus pada paham negara (*statism*), ketahanan (*survival*), memikirkan nasib sendiri (*self-help*), dengan asumsi bahwa negara adalah aktor utama yang berbasis geografis yang berada di dalam sebuah sistem internasional yang anarkis di mana tidak terdapat otoritas di atasnya. Sampai tahun 1950-an, realisme politik ini menjadi paradigma yang dominan dalam studi HI dan mengaku berakar pada pemikiran “realis” sejak jaman sebelum Masehi seperti Thucydides, Kautilya, dan Sun Tzu, maupun para pemikir besar abad pertengahan seperti Hobbes, Machiavelli dan Rousseau. Namun paradigma realis ini kemudian menghadapi banyak kritikan, terutama di awal tahun 1960-an, terutama dari kalangan behavioralis yang menekankan pendekatan saintifik, yakni upaya teorisasi yang sesungguhnya, mengingat selama ini kaum realis tidak memiliki disiplin dan ketepatan konseptualisasi sehingga tidak terukur dan tidak bisa dianalisis dengan sungguh-sungguh.⁶ Lebih dari itu, pengkritik ini mennganggap bahwa baik pendekatan idealis maupun realis, keduanya sama-sama tidak saintifik, dan kemudian menyebut keduanya sebagai pendekatan “tradisional” yang harus digantikan oleh pendekatan baru yang “saintifik”. Pendekatan baru ini menekankan kajian tentang “apa yang

terjadi” dalam hubungan internasional ketimbang “apa yang seharusnya terjadi” menurut pemikiran tradisional. Masa-masa keemasan paradigma behavioral-kuantitatif telah menyumbangkan warisan berupa upaya gigih untuk membuktikan bahwa HI bukanlah sekadar *art*, melainkan juga *science*. Dougherty dan Pfaltzgraff meringkaskan bahwa paradigma behavioral-kuantitatif:⁷

1. telah melakukan adaptasi terhadap berbagai teori, proposisi, kerangka konseptual, metodologi, dan gagasan dari disiplin lain, khususnya termasuk sosiologi, psikologi sosial, ilmu manajemen-administrasi, psikologi, antropologi, ekonomi, dan matematika;
2. telah berupaya menghubungkan gejala dari disiplin-disiplin lain dengan gejala yang nampak mirip pada tingkat internasional, yang mengambil mengambil secara penting dua bentuk penguatan timbal-balik dari pengujian terhadap gejala internasional dengan (a) penggunaan kerangka konseptual, teori dan proposisi dengan mana gejala yang mirip dari disiplin lain diuji dan (b) analisis perbandingan dari gejala-gejala seperti konflik, integrasi, bargaining, negosiasi, dan deterens di dalam konteks internasional dan lainnya serta bidang-bidang lain;
3. telah memusatkan perhatian pada masalah tingkatan analisis, yaitu upaya untuk membedakan secara konseptual dan metodologis antara pengambil keputusan orang-perorang, negara, subsistem internasional, dan sistem internasional itu sendiri;
4. telah berupaya menggambarkan secara jelas perbedaan antara teori makro, atau *grand theory*, dan apa yang disebut teorisasi berjangkauan menengah (*middle-range theory*), dan suatu tendensi bagi pakar untuk memusatkan perhatian secara eksplisit pada suatu level teori atau aras teori lainnya;
5. telah menjadi suatu usaha yang lebih besar untuk menjadikan kajian hubungan internasional semakin komparatif yang telah memiliki dua dimensi: (a) suatu uraian perbandingan dalam sebuah konteks kekinian dan (b) suatu upaya runtut untuk membandingkan berbagai aspek hubungan internasional dalam konteks sejarah dan untuk menggambarkan perbandingan antara gejala internasional semasa dan yang sudah menyejarah;
6. telah memusatkan perhatian terhadap masalah-masalah pengumpulan data, yakni suatu usaha untuk memerah data yang ada secara lebih terampil, untuk mengembangkan sumber-sumber data baru, dan untuk membangun kearsipan atau bank data yang dilengkapi dengan fasilitas penyimpanan dan penampilan kembali bahan-bahan bagi keperluan penelitian;
7. telah meningkatkan jangkauan metodologi, tetapi kurang adanya konsensus sebagai hal yang paling tepat bagi kajian gejala internasional; dan
8. telah berusaha secara lebih sadar untuk mengaitkan penelitian dengan pembangunan teori, yaitu pengembangan kriteria relevansinya bagi penelitian, dan dengan pernyataan mengenai masalah-masalah dan analisisnya yang dengan cara tersebut memungkinkan bagi pakar lain untuk mereplikasi, atau menduplikasi, penelitian semacam itu dan untuk berusaha mengembangkan pengetahuan yang kumulatif.

Namun penekanan berlebihan terhadap metodologi melahirkan kritik terhadap behavioralisme sebagai paradigma yang lebih mengutamakan metode penelitian ilmiah (*method-driven*) yang cenderung bebas-nilai ketimbang penyelidikan atas berbagai masalah menarik (*question-driven*) walaupun bisa jadi berada di luar jangkauan metodologi saintifik itu, misalnya sebab-sebab perang

yang sulit dikuantifikasi apalagi dieksperimentasikan. Kritik ini melahirkan apa yang kemudian oleh David Easton disebut “revolusi pasca-behavioralis” yang tidak bermaksud menentang asas-asas ilmiahnya, namun hanya menginginkan agar studi HI dapat ikut memecahkan persoalan sosial dan politik yang dihadapi umat manusia masa kini.⁸ Yosef Lapid (1989) menyebutnya sebagai “era pasca-positivis”.⁹ Sejak tahun 1990-an, paradigma pasca-behavioralisme itu mengkristal ke dalam tiga corak utama, yakni pertama, rasionalisme yang terdiri atas neorealisme dan neoliberalisme; kedua, reflektivisme yang memuat pasca-modernisme, teori feminis, teori normatif, teori kritis, dan sosiologi historis; dan ketiga, konstruktivisme sosial yang berupaya menjembatani kesenjangan di antara dua corak sebelumnya.¹⁰

Namun demikian, tidak seperti ilmu-ilmu alam, kehadiran suatu paradigma baru tidak dapat secara telak menyingkirkan paradigma lama, sehingga dalam satu periode bisa terdapat berbagai paradigma yang saling bersaing dan masing-masing memiliki pengikut yang besar.¹¹ Tulisan yang dibuat pada pertengahan tahun 1990-an itu sampai saat ini rasanya masih relevan, mengingat, ketika nanti pembaca memasuki halaman demi halaman buku ini, maka serasa memasuki sebuah taman bunga, di mana berbagai bunga warna-warni tumbuh kembang bermekaran. Berbagai pandangan mengenai apa yang “terpenting” dalam kajian HI, di mana posisi paradigmatis para pakar HI, bagaimana mereka masing-masing mengembangkan dan menerapkan teorinya, pada tingkat analisis mana mereka menekankan diri dan sebagainya, sangat beragam, seberagam asal-usul perjalanan intelektual mereka yang juga sekaligus menegaskan bahwa HI adalah ilmu yang dikembangkan secara lintas-disipliner.

Dengan demikian, buku ini merupakan bunga rampai pemikiran para pakar HI. Walaupun membicarakan teori, namun para pembaca jangan khawatir akan banyak mengerutkan kening karena yang menjadikan *Theory Talks* khas adalah bahwa perdebatan lintas-pakar ini dibangun dengan format wawancara yang ‘ringan’ dan terstruktur rapi. Setiap pakar akan ditanya setidaknya mengenai poin-poin berikut:

- Tantangan terbesar atau apa perdebatan terpenting dalam ilmu HI dewasa ini menurut pakar tersebut;
- Posisi atau bagaimana pakar tersebut menjawab tantangan/perdebatan terpenting itu;
- Bagaimana pakar tersebut tiba pada posisi sekarang ini dalam mengkaji HI;
- Apa yang dibutuhkan atau apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa agar dapat menjadi spesialis di bidang HI seperti pakar tersebut;
- Baru kemudian pewawancara mengeksplorasi teori yang dikembangkan oleh pakar tersebut, mengkonfirmasi sejumlah karyanya, mengkomparasikan pemikirannya terhadap pakar lain, dan mencoba keampuhan teorinya itu dalam menganalisis dan menjelaskan berbagai kasus penting.

Dengan cara tersebut, para pembaca, terutama para mahasiswa yang baru saja menapaki perjalanan intelektualnya sebagai pengkaji ilmu politik, khususnya HI, akan dibawa secara rileks tidak hanya memahami dasar-dasar pemikiran seorang pakar HI, namun juga mendapatkan informasi berharga mengenai proses perjalanan intelektual para pakar tersebut, dan hal-hal apa yang dibutuhkan atau harus dilakukan oleh mahasiswa itu apabila ingin menjadi pakar/spesialis HI seperti mereka.

Theory Talks sebagai sebuah kompilasi hasil wawancara yang segar (*living*) juga menegaskan interdisiplinartitas kajian HI. Di dalamnya para pakar tegas-tegas berpesan kepada para penstudi HI bahwa sekalipun HI dipandang sebagai cabang dari ilmu politik, namun demikian ada sejumlah ilmu dasar yang harus dikuasai untuk memahami HI, antara lain sosiologi, ilmu hukum, ilmu ekonomi, antropologi, geografi, dan psikologi, bahkan wawasan keilmuan penstudi HI sebaiknya juga merambah *hard sciences* seperti matematika, statistika, dan kajian strategis, termasuk ilmu kemiliteran. Ragam keilmuan yang kemudian diramu ke dalam kajian HI tersebut memberikan sejumlah konsekuensi setidaknya pada hal-hal berikut:

- Perdebatan mengenai definisi HI;
- Perdebatan mengenai ruang lingkup atau pokok bahasan HI; dan
- Kurikulum pembelajaran HI

Perdebatan mengenai definisi HI di awal milenium ketiga ini masih berkisar pada kedaulatan negara sebagai unit mandiri dalam hubungan internasional. Asumsi bahwa bangsa-bangsa dianggap berdaulat pada urusan dalam negerinya dan bahwa kekuatan-kekuatan asing tidak dapat memaksakan pengaruh internal yang besar atas bangsa-bangsa tersebut dipandang tidak lagi sesuai dalam sistem internasional dewasa ini dan mungkin sistem seperti itu tidak dapat memberikan konseptualisasi yang tepat, sebab negara-negara, meski secara hukum berdaulat, senantiasa menghadapi masalah-masalah dalam negeri yang ditimbulkan dari dampak peristiwa-peristiwa yang berasal dari luar batas wilayahnya. Buktinya, sejak akhir tahun 1960-an, pustaka-pustaka HI banyak yang mencoba menguji “kaitan” antara sistem nasional dan internasional, dan untuk mengkaji sistem politik “terpenetrasi” dengan kebijakan politik dalam negeri yang terpengaruh oleh perkembangan yang terjadi di luar batas-batas negara mereka.¹² Dalam tahun 1980-an, ketepatan konsep-konsep semacam itu sendiri dipertanyakan di dalam sebuah dunia yang ditandai oleh “kesalingtergantungan yang hirarkis.”¹³ Kritik terhadap pemahaman tentang sistem internasional dewasa ini, yang pada gilirannya berhubungan dengan ketidaktepatan model-model atau teori-teori yang diwarisi dari masa lampau, didasarkan secara luas atas perubahan-perubahan yang dianggap terjadi –baik perubahan struktural, prosedural, dan substantif – khususnya dari generasi terakhir sistem internasional.¹⁴ Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sistem internasional pada akhir abad ke-20 adalah bersifat global. Sistem internasional pada akhir abad ke-20 dikatakan memuat sejumlah besar kekuatan yang beragam, terpecah, dan tidak bersesuaian, antara lain: nasionalisme versus internasionalisme (termasuk regionalisme), kosmopolitanisme versus parokialisme, kekuatan versus kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi versus pemerataan, kesalingtergantungan versus ketergantungan, integrasi versus disintegrasi – yang semuanya itu meningkatkan kerumitan masalah perbenturan antara pakar HI dan para pembuat kebijakan luar negeri.

Para pakar dalam buku ini juga telah membuktikan bahwa asumsi tradisional yang menyatakan bahwa hanya negara-bangsa saja lah aktor politik internasional. Pertumbuhan organisasi dan rezim internasional pada tingkat regional maupun global, peningkatan arti penting perusahaan multinasional (MNCs) dan berbagai aktor non-negara lainnya, khususnya sejak tahun 1970-an dengan munculnya gerakan-gerakan teroris dan revolusioner dan meluasnya kontak-kontak transnasional dalam bentuk tumbuh kembangnya INGOs (*international non-governmental organizations*) dan gejala kesalingtergantungan, telah memberikan sebuah rangkaian dimensi baru

hubungan internasional. Hal ini berjaln berkelindan dengan isu-isu global (perubahan iklim, penyakit menular pandemik, kemitraan global, dan sebagainya) yang berpotensi mempengaruhi bahkan menekan aktor negara bangsa sehingga menjadi tidak semandiri sebelumnya dalam memenuhi kepentingan-kepentingan luar negerinya.

Lebih dari itu, tekanan terhadap kemandirian aktor negara-bangsa dewasa ini juga bersumber dari dalam negeri. Secara tradisional, perilaku politik dalam sebuah konteks internasional disumsikan berbeda secara fundamental daripada perilaku politik domestik. Perbedaan itu secara asasi dilukiskan dengan model pembuatan keputusan domestik yang bersifat memusat dan di arena internasional bersifat menyebar. Pemerintah dalam satuan-satuan nasional dipandang memegang monopoli daya paksa atas unit-unit domestiknya, berlawanan dengan ketersebaran pembuatan keputusan dan kemampuan daya paksa di dalam sistem internasional. Namun di dalam buku ini sejumlah pakar memperdebatkan kemiripan ketimbang perbedaan antara proses-proses politik pada tingkat nasional dan internasional. Terlebih di negara-negara yang dipandang lemah (*weak states*), salah urus (*bad governed*) atau bahkan negara gagal (*fail states*), yang secara eufenistik disebut sebagai wilayah-wilayah kurang berkembang (*less-developed*). Di dalam buku ini, ketertarikan para pakar mengenai sistem-sistem politik di wilayah-wilayah yang kurang berkembang, khususnya sejumlah negara di Afrika, di mana terdapat kesetiaan kesukuan yang sering berbenturan dengan kekuatan-kekuatan modern dan kekuatan politik yang efektif masih tersebar, telah menyumbang pengamatan ulang atas catatan-catatan lama mengenai keunikan proses-proses politik internasional sebagaimana yang diperlawankan atasnya pada tingkat-tingkat yang lain.

Mengenai persoalan kedua, yakni perdebatan tentang ruang lingkup HI, sepanjang yang ada dalam 30 artikel di buku ini, kalau diringkaskan meliputi:

- Perang dan Damai, Militer, Keamanan (Lihat artikel nomor 1, 2, 12, 16, 26, 29, dan 30);
- Sistem internasional, sistem dunia, pemerintahan global, lembaga internasional, globalisasi (3, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 23, dan 25)
- Metodologi HI (3, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 22, 24, 27, dan 28)
- Negara dan Pasar (1, 4, 11, 14, 19, 21, dan 24)
- Geografi, Geopolitik (4, 6, 10, dan 20)
- Demokrasi (8, 20, 21, dan 23)
- Lingkungan hidup (11)
- Ekonomi, Ekonomi Politik Internasional (9, 14, 17, 20, dan 24)
- Gagasan Besar (14, dan 23)
- Antropologi (16, 18, dan 20)
- Identitas (18, dan 22); dan,
- Diplomasi (26)

Sekalipun nampak jelas isu klasik peperangan-perdamaian serta keamanan dan militer masih menarik, penekanan isu lebih banyak pada sistem dan rezim internasional, pemerintahan global maupun globalisasi itu sendiri. Namun demikian perhatian para pakar tersebut belum beranjak jauh dari apa yang dikemukakan oleh Karl W. Deutsch pada tahun 1978 yang mengidentifikasi 12 topik bahasan HI.¹⁵ Namun sangat jelas bahwa hampir semua pakar,

termasuk yang mengaku sebagai teoretikus murni pun, lebih cenderung nyaman untuk mengembangkan *middle-range theories* dengan aroma kuat pasca-behavioralis yang tidak lagi memisahkan antara fakta dan nilai, dan menyarankan agar para pakar HI juga terlibat dalam proses pengambilan keputusan serta pemecahan masalah-masalah spesifik, ketimbang membidik penyelidikan murni ke arah penciptaan *grand theory* baru yang secara terang-terangan atau tidak, mereka hindari. Hal itu sangat tampak ketika dalam banyak artikel, para pakar tersebut menyoroti negara-negara di kawasan Afrika Sub-Sahara (3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, dan 29). Lebih dari 50% pakar tersebut mengulas tentang Afrika Sub-Sahara. Rupanya kawasan ini sangat menantang pemikiran para pakar HI dalam berbagai aspeknya. Kawasan yang tampaknya bagi kita di Indonesia masih kurang dipandang penting untuk dipelajari ketimbang, taruhlah, mengkaji tentang Uni Eropa, perkembangan China atau yang sekarang sedang mengundang perhatian, BRIC (*Brazil, Russia, India and China*), krisis ekonomi Amerika Serikat dan dampak globalnya, atau berkutat membahas ASEAN sendiri, padahal negara-negara seperti China, India, bahkan Iran, telah menjadikan kawasan Afrika Sub-Sahara sebagai wilayah rambahan baru, terutama dalam hal ekonomi-perdagangan maupun investasi pembangunan.

Untuk persoalan ketiga, yakni kurikulum pembelajaran HI, pesannya jelas, bahwa dikarenakan HI merupakan ilmu lintas disiplin dan ‘semi’ terapan, maka para mahasiswa di tahun-tahun awal harus memiliki kompetensi terhadap sejumlah ilmu dasar, yakni:

- Ilmu politik;
- Sosiologi;
- Ilmu hukum;
- Ilmu ekonomi;
- Antropologi; dan,
- Geografi.

Betapa pentingnya pengetahuan interdisipliner, misalnya dalam sebuah uraian di dalam buku ini dikatakan bahwa, banyak mahasiswa yang tertarik mempelajari ekonomi politik internasional, namun tanpa bekal sedikitpun mengenai asas-asas ekonomi. Bisa diduga, hasilnya akan mengecewakan. Dalam tahap lebih lanjut, bahkan mahasiswa perlu pula menguasai prinsip-prinsip psikologi (menyangkut *political leadership, decision making process*), khususnya psikologi sosial, dan sebaiknya juga merambah *hard sciences* seperti matematika, statistika, dan kajian strategis, termasuk ilmu kemiliteran, dan sebagainya.

Lebih dari itu, menurut para pakar tersebut, mengkaji ilmu HI memerlukan penghayatan. Pustaka ajar (*text-books*), pustaka acuan (*references*), dan saat ini yang sangat diandalkan adalah keberlimpahan data dan informasi melalui internet, belum cukup. Menurut mereka, HI tidak mungkin dipelajari kalau sang penstudi hanya *ngendon* di satu negara saja. Mereka perlu mengunjungi, tinggal dalam jangka waktu tertentu, menguasai bahasa dan bergaul langsung dengan budaya di dalam masyarakat atau negara yang hendak diteliti, dalam rangka menyerap alam-pikiran masyarakat dan pemerintah negara tersebut.

Hal yang perlu diingat adalah bahwa sebagai penggagas forum *Theory Talks*, ‘pewawancara’ sekaligus *editor-in-chief*, Peer Schouten tampaknya tidak mengurutkan atau mensistematisasi siapa-

siapa pakar yang diwawancarai. Kesan yang ada adalah pakar mana yang lebih mudah dihubungi dan lebih cepat merespons, itulah yang dimuat terlebih dahulu. Oleh karena itu buku ini tidak boleh dipandang sebagai suatu kompilasi yang komprehensif, melainkan sekadar pengantar terhadap pemikiran sebagian pakar HI, walaupun istimewanya, tidak ada pembatasan aliran pemikiran maupun asal-usul pakar tersebut dari lembaga atau perguruan tinggi mana. Hal ini dapat menciptakan nuansa pemikiran global yang makin menegaskan *keanekaragaman* dan *ketidakepakatan* itu sebagai suatu hal yang wajar dan tak terelakkan. Terlebih buku ini terbit dengan baru menampilkan 30 (dari 47) pakar HI beserta pemikirannya, dengan pertimbangan teknis jumlah halaman terbitan dan kesegeraan tampil di hadapan pembaca para pemerhati.

Singkat kata, seperti halnya kajian hubungan internasional, bagaikan bandul pendulum yang bergerak dari kecenderungan ekstrim teori normatif pada tahun 1920-an ke teori analitik-empirik pada tahun 1960-an, generasi baru pakar HI belakangan ini telah berupaya mengembangkan teori HI yang lebih relevan dengan aneka masalah yang menjadi tantangan bagi masyarakat internasional dewasa ini, sementara pada saat yang sama berupaya untuk mengembangkan teori-teori yang berdaya eksplanasi tinggi dan memiliki kapasitas prediktif yang lebih akurat, tapi mungkin dengan toleransi yang lebih tinggi terhadap pluralitas pandangan teoritik dan keanekaragaman metodologi ketimbang upaya teorisasi paradigmatis di tahun-tahun 1960-an. Dengan demikian, pencarian atas teori atau teori-teori yang tepat untuk memenuhi kebutuhan akademik maupun memecahkan problematika masyarakat dunia yang senantiasa terus berubah sebagaimana yang kita saksikan dewasa ini terus berkembang melintasi batas waktu melewati ambang abad baru serta memasuki dasawarsa kedua di milenium ketiga sekarang ini.

CATATAN:

¹ Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi* (Jakarta: LP3ES, 1994), hal. 12.

² Thomas Kuhn, *The Structure of Scientific Revolution* (University of Chicago: 1970).

³ Lihat Yale H. Ferguson dan Richard W. Mansbach, *The Elusive Quest: Theory and International Politics* (Columbia: University of South Carolina Press, 1988), hal. 3-9

⁴ Bukan untuk menyatakan bahwa perhatian para mahasiswa hubungan internasional selama masing-masing tingkat ini telah bersifat eksklusif secara timbal-balik. Contohnya dari masing-masingnya bisa ditemukan pada setiap tingkat perkembangan hubungan internasional.

⁵ Scott Burchill dan Andrew Linklater (eds.), *Theories of International Relations*, (Palgrave: 2005) hal. 6-7.

⁶ Mas'ood, op. cit., hal. 20.

⁷ James E. Dougherty dan Robert L. Pfaltzgraff, Jr., *Contending Theories of International Relations, A Comprehensive Survey*, 3rd edition (Harper Collins, 1990), bab 13.

⁸ Mas'ood, op. cit., hal. 25.

⁹ John Baylis dan Steve Smith (eds.), *The Globalization of World Politics, an Introduction to International Relations* (Oxford University Press, 1997), hal. 168.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Mas'ood, op. cit., hal. 12.

¹² Lihat, contohnya, James N. Rosenau, ed., *Linkage Politics: Essays on the Convergence of National and International Systems* (New York: The Free Press, 1969); "Compatibility, Consensus, and Emerging Political Science of Adaptation," *American Political Science Review*, LXI, No. 3 (Desember 1967), hal. 983-988; dan Wolfram F. Hanrieder, "Compatibility and Consensus: A Proposal for the Conceptual Linkage of External and Internal Dimensions of Foreign Policy," *American Political Science Review*, LXI, No. 3 (Desember 1967), hal. 971-982.

¹³ Lihat James N. Rosenau, "A Pre-Theory Revisited: World Politics in an Era of Cascading Interdependence," *International Studies Quarterly*, 28, No. 2 (1984), hal. 245-305.

¹⁴ Lihat Donald J. Puchala dan Stuart I. Fagan, "International Politics in 1970s: The Search for a Perspective," *International Organization*, 28, No. 2 (Musim Semi, 1974), hal. 247.

¹⁵ Karl W. Deutsch, *The Analysis of International Relations* (Prentice-Hall, 1978), Bab 1.